

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Absori, Absori, et al. "Sosialisasi Kebijakan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Dalam Perspektif Reformasi Agraria." *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, vol. 4, no. 1, 2022, hal. 26–32.

Adinegoro, Kurnia Rheza Randy. "Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik Di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, vol. 4, no. 2, 2023, pp. 130–43.

Alfons, Mujiati, dan Dian Aries Mujiburohman. "Masalah Delik Pertanahan." *Jurnal Spektrum Hukum*, vol. 19, no. 2, 2021, hal. 144.

_____, "Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 7, niano. 1 (2021)

Arizki, Lalu Muhammad Wira, Arief Rahman, dan M. Yazid Fathoni. "Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi." *Private Law*, vol. 3, no. 2, 2023, hal. 489–500.

Ayu, Andi Puji. Analisis Sengketa Tanah yang Timbul dari Kegiatan Pengadaan Tanah dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng di Gilireng Kabupaten Wajo. Disertasi Doktor. Universitas Hasanuddin, 2021. hal. 1.

Awaludin, Robi. "Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi Dalam Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif." *AL MAQASHIDI*, vol. 4, no. 2, 2021, hal. 1–16.

Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan" *Pre-print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, hal 4.

Darnus, Andi Batara Bintang, Syahrudin Nawi, dan Sri Lestari Poernomo. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Mengalami Sengketa." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 3, no. 8, 2022, hal. 1282–93.

Dilapanga, Reynaldi A. "Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960." *Lex Crimen* , jilid. 6, No 5, 2017, hal.142.

Djari, Ruben Denny. "Urgensi Rancangan Undang-Undang Tentang Mediasi: Terwujudnya Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak." *Jurnal Education and Development*, vol. 8, no. 1, 2020, hal. 141.

Febrianti, Suci. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik." *Indonesian Notary*, vol. 3, no. 3, 2021, hal. 9.

Hadisiswati, Indri. "Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah." *Jurnal Ahkam*, vol. 2, no. 1, 2014.

Hamidi, dan Moh Abdul Latif. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Wilayah Madura Secara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional." *YUDISIA:*

Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, vol. 12, no. 1, 2021, hal. 51–72.

Hanifah, Mardalena. “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, vol. 2, no. 1, 2016, hal 1.

Hasbi, Hasnan. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Proses Mediasi Di Badan Pertanahan Kota Makassar.” *Pleno Jure 9*, no. 1 (2020).

Hipan, Nasrun, Nirwan Moh Nur, dan Hardianto Djanggih. “Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai.” *Jurnal Law Reform*, vol. 14, no. 2, 2018, hal. 206.

Husain Isa, Mohamad Jusuf, Nur Zakiah, and Fitri Fuji Astuti Ruslan. “Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah.” *Jurnal Multidisiplin Madani*, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 1461–76.

Intariani Dg Masese, S., Sufirman Rahman, dan Sri Lestari Poernomo. "Efektivitas Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020." *Journal of Lex Generalis (JLG)*, vol. 4, no. 1, 2023, hal. 74–90.

Karta Negara, Candya Upavata Kutey, Ni Wayan Widya Pratiwi, and Prisca Dwi Maylinda. “Urgensi Sistem Pengamanan Pada Sertifikat Tanah Digital.” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no. 9, 2021, hal. 832–55.

Kurniati, Nia. “Mediasi-Arbitrase Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Jurnal Sosiohumaniora*, vol. 18, no. 3, 2016, hal. 197.

Kurniati, Nia, dan Efa Laela Fakhriah. "BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016." *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017)

Lestari, Selma Ayu, et al. "Land Reform Sebagai Gerakan Pemerataan dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Pertanian." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, vol. 2, no. 2, 2024, hal. 57.

Mandoyo, Thomas Harmoko. "Pelaksanaan Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Pengembalian Batas Bidang Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kota Salatiga)." *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 11, no. 3, 2020.

Mangara, Gerhard, and Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 3, no. 4, 2022, hal. 271.

Mujiburohman, Dian Aries. "Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis Dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, vol. 7, no. 1, 2021, hal. 57–67.

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, vol. 5, no. 3, 2006, hal. 93.

Putra, Hendi Sastra, et al. "Peranan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, vol. 7, no. 1, 2022, hal. 99–113.

Rahmad, Said Syahrul. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Peradilan Adat (Studi di Gampong Ujong Lamien dan Akue Seupeng Kabupaten Nagan Raya)." *Jurnal Bidayah*, vol. 8, no. 2, 2017, hal. 193.

Rahmawati, Ulfah Dwi, and Moh Indra Bangsawan. "Urgensi Kebijakan Satu Peta Untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan." *In Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 2022, hal. 42–59.

Rifa'i, Yasri. "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 1, 2023, hal. 32.

Rifqi, Arie Kartika, dan Marsella. "Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu." *Jurnal Mercatoria*, vol. 14, no. 2, 2021.

Risnawati, Ayu Sari, and Nurwati. "Urgensi Pengukuran Ulang Batas Kepemilikan Tanah di BPN Kab Magelang." *Jurnal Varia Justicia*, vol. 11, no. 1, 2016, hal. 67.

Rizal Ramli, Muh., Kairuddin Karim, and Muhammad Akbar Fhad Syahril. "Polemik Sengketa Hak Atas Tanah." *Jurnal Litigasi Amsir*, vol. 9, no. 1, 2021, hal 20.

Rokilah, dan Mia Mukaromah. "Pemilik Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing." *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, 2018, hal. 141.

Sadono, Awang Hardian. "Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

- Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.” *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, vol. 2, no. 1, 2023, hal. 12–27.
- Safiuddin, Sahrina. “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.” *Mimbar Hukum*, Vol. 30, No.1 (2018): 69.
- Saputra, Tri Eka. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria.” *Vifada Assumption Jurnal of Law* 1, no. 1 (2023)
- Siregar, Resi Atna Sari. “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” *Islamic Circle*, vol. 2, no. 1, 2021, hal. 41–51.
- Subekti, Rahayu, Purwono Sungkowo Raharjo, dan Hadhika Afghani Imansyah. “Sistem Pendaftaran Tanah Yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, vol. 8, no. 2, 2022, hal. 394–405.
- Sukananda, Satria. “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, vol. 2, no. 3, 2021, hal 160–69.
- Sukmawati, Putu Diva. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 2, no. 2, hal. 92.
- Wisudawan, I Gusti Agung, H. Moh Saleh, Eduardus Bayo Sili, dan Diman Ade Mulada. "Upaya Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ADR (Alternatif Dispute Resolution) di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten

Lombok Barat." *Jurnal Sosial Sains dan Teknologi*, vol. 3, no. 1, 2023, hal. 3.

Wahyono, Eko Budi. "Pemikiran Pengembangan Skkni – Ig Untuk Surveyor Kadaster." *Seminar Nasional Geomatika*, vol. 2, 2018, hal. 419.

Wawor, Fingli A. "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah." *Lex Privatum*, vol. 2, no. 2, hal 98.

BUKU

Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Tahta Media Group, 2022, hal. 2.

Lamintang, P. A. F., & Samosir, C. D. *Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*. Nuansa Aulia. 2010

Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1999, hal 22.

Rusmadi Murad. (1999). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni.

Sarjita. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2005, hal 8.

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, 2007, hal. 118.

Syarief, Elza. “Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan”. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.

_____. “Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan”. Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hal 294

Wardiono, Kelik, et al. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, hal 34.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022, hal 7.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. 2016.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan*. PERMEN ATR BPN No. 21 Tahun 2020. Hal. 1–71.

Kementerian ATR/Kepala Badan Pertanahan. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana. no. 3, 2021, hal. 1–47.*

Kementerian ATR/BPN. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian ATR/BPN, 2016.*

Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Peraturan Presiden, 2013, 2016.*

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Pemerintah Republik Indonesia. *PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Icassp, vol. 21, no. 3, 1997, hal. 295–316.*

Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 1999.*